PARABELA

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (15-25)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/56a46306

Analisis Demografi dan Kebijakan Agraria dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Responsif: Studi Kasus Konflik Agraria Akibat Ekspansi Pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Humairah Muljabar[1*], Fauzan[2]

[1*3]*Program Studi Doktoral Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*
[2]*Program Studi Doktoral Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

e-mail Coresponding Author: rarah36@gmail.com

Abstract

Responsive local government is one of the indicators of successful regional autonomy in providing public services that are fair, participatory, and sustainable. In North Konawe Regency, Southeast Sulawesi, efforts to establish responsive local government face challenges arising from agrarian conflicts triggered by the expansion of nickel mining activities. On the other hand, the region has a demographic bonus that has the potential to become an important asset for development if supported by equitable agrarian policies. This study aims to analyze demographic conditions and agrarian policies, identify the challenges faced by the local government as a result of agrarian conflicts, and formulate solutions to establish responsive local government in North Konawe Regency. This research uses a normative legal research method with a statutory approach, conceptual approach, and analytical approach. Data were obtained through a literature review based on laws and regulations, scientific journal articles, Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik) documents, government documents, and various relevant official sources identified through web searches. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The results show that the demographic bonus in North Konawe Regency presents an opportunity to support regional development; however, it has not been utilized optimally due to limited employment opportunities, socioeconomic inequality, and agrarian conflicts resulting from the expansion of nickel mining activities. These conflicts have an impact on legal certainty, community welfare, and the quality of local government governance.

Keywords: *demographics, agrarian policy, responsive local government, agrarian conflict, nickel mining.*

Abstrak

Pemerintahan daerah yang responsif merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dalam memberikan pelayanan publik yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif menghadapi tantangan akibat konflik agraria yang dipicu oleh ekspansi pertambangan nikel. Di sisi lain, daerah ini memiliki bonus demografi yang berpotensi menjadi modal pembangunan apabila didukung oleh kebijakan agraria yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aspek demografi dan kebijakan agraria, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah akibat konflik agraria, serta merumuskan solusi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif di Kabupaten Konawe Utara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, dokumen Badan Pusat Statistik, dokumen pemerintah, serta berbagai sumber resmi

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (15-25)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/56a46306

hasil penelusuran web yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa bonus demografi di Kabupaten Konawe Utara merupakan peluang dalam mendukung pembangunan daerah, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja, ketimpangan sosial ekonomi, serta konflik agraria akibat ekspansi pertambangan nikel. Konflik tersebut berdampak terhadap kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Kata kunci: demografi, kebijakan agraria, pemerintahan daerah responsif, konflik agraria, pertambangan nikel

1. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin daerah. Dalam konteks Indonesia, demokrasi berkembang pesat pasca reformasi 1998, yang ditandai dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintahan daerah menjadi aktor penting dalam pelaksanaan demokrasi karena berperan langsung dalam pelayanan publik dan pengambilan kebijakan yang menyentuh masyarakat secara langsung . Oleh karena itu, kualitas demokrasi di daerah sangat ditentukan oleh bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat berjalan secara partisipatif dan transparan.1

Dalam praktiknya, demokrasi di tingkat daerah tidak selalu berjalan ideal, karena masih terdapat berbagai tantangan seperti dominasi elit politik dan praktik dinasti politik. Di Sulawesi Tenggara misalnya, fenomena dinasti politik menunjukkan bahwa kekuasaan sering kali berpusat pada kelompok tertentu sehingga menghambat demokrasi yang kompetitif dan substantif . Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak hanya dipengaruhi oleh sistem, tetapi juga oleh struktur sosial dan karakteristik masyarakat setempat.2

Salah satu faktor penting yang memengaruhi demokrasi daerah adalah aspek demografi. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran, serta kualitas sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan dan pendapatan. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas penduduk memiliki hubungan signifikan dengan kualitas demokrasi, terutama dalam hal partisipasi politik masyarakat . Dengan demikian, semakin baik kualitas demografi suatu daerah, maka semakin besar peluang terciptanya demokrasi yang sehat.3

Di sisi lain, aspek agraria juga memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah. Agraria tidak hanya menyangkut kepemilikan lahan, tetapi juga distribusi dan akses

[1] Huriyah, S., Hazyimara, K., & Zuhairah, S. (2024). Dinamika keamanan dan demokrasi di Indonesia. Sanger: Journal of Social, Administration and Government Review, 2(2). https://doi.org/10.22373/sanger.v2i2.5967

[2] Harjudin, L. O., & Zuada, L. H. (2020). „Musim semi" dinasti politik pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara. Transformative, 6(1). https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.6

[3] Muhiddin, A. (2015). Penduduk dan demokrasi (studi kasus pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013–2018 di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa). Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1). https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.101

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (15-25)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/56a46306

masyarakat terhadap sumber daya tersebut. Ketimpangan dalam penguasaan tanah sering kali menjadi sumber konflik yang berkepanjangan di Indonesia . Hal ini menunjukkan bahwa persoalan agraria memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan politik di daerah.4

Secara demografis, data menunjukkan bahwa sekitar 67,56% penduduk Sulawesi Tenggara berada pada kelompok usia produktif. Komposisi ini menggambarkan adanya bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang besar bagi pembangunan daerah. Penduduk usia produktif memiliki potensi tinggi dalam meningkatkan partisipasi politik, produktivitas ekonomi, serta mendorong inovasi dalam pembangunan daerah. Namun, apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan kebijakan yang tepat, kondisi ini justru dapat menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh fakta empiris terkait kondisi ekonomi daerah. Berdasarkan penelitian oleh Caesar Muslim dkk. (2024), pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara selama periode 2013–2022 menunjukkan tren positif dengan rata-rata sekitar 5,58% per tahun. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan secara signifikan, bahkan ditemukan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung tidak merata dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi hasil pembangunan, yang berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat serta melemahkan legitimasi pemerintah daerah.[5]

Selain itu, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara juga menjadi indikator penting dalam melihat kualitas pemanfaatan bonus demografi. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tenggara berada pada kisaran 3,3–3,4% pada tahun 2025, yang tergolong relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional. Meskipun demikian, angka ini tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan yang tersedia. Sebagian besar tenaga kerja masih terserap di sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan penduduk usia produktif belum sepenuhnya diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, sehingga berpotensi memunculkan ketimpangan sosial.[6]

Dari sisi ketimpangan ekonomi, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rasio gini (Gini Ratio) di Sulawesi Tenggara pada Maret 2025 berada di angka sekitar 0,363, yang menandakan tingkat ketimpangan masih berada pada kategori sedang . Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, ketimpangan masih menjadi persoalan penting, terutama karena terdapat kecenderungan peningkatan ketimpangan di wilayah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi hasil pembangunan belum merata, khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada sektor agraria seperti pertanian

[4] Zuber, A. (2013). Konflik agraria di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif, 8(1), 147–158. https://ejournal.uinsuka.ac.id/isoshum/index.php/sosiologireflektif/article/view/517

[5] Muslim, C., Nur, S., Hastuti, H., & Muadsim, I. (2024). Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulaw

[6] Sultrazone.id. 2026. "Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sultra dan Faktor Pemicunya". Diakses melalui https://sultra.indozone.id/news/2486689305/data-

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (15-25)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/56a46306

dan perkebunan.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren yang cukup positif. Pada tahun 2025, ekonomi Sulawesi Tenggara tercatat tumbuh sekitar 5,79%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya . Namun, sebagaimana hasil penelitian sebelumnya, pertumbuhan ini belum sepenuhnya inklusif karena belum mampu menekan kemiskinan secara signifikan. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi, di mana pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu atau sektor tertentu, seperti industri pengolahan dan pertambangan.

Salah satu permasalahan agraria yang paling menonjol di Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi di Kabupaten Konawe Utara, yang merupakan salah satu sentra pertambangan nikel nasional. Meningkatnya aktivitas pertambangan dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun pada saat yang sama memunculkan berbagai persoalan agraria, seperti tumpang tindih penguasaan lahan, konflik antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan, serta degradasi lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi belum sepenuhnya diikuti dengan tata kelola agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Konflik agraria di Kabupaten Konawe Utara tidak hanya berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Ekspansi kawasan pertambangan menyebabkan berkurangnya lahan produktif masyarakat, sementara manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan belum dirasakan secara merata oleh penduduk setempat. Selain itu, berbagai laporan juga menunjukkan adanya persoalan pencemaran lingkungan, kerusakan daerah aliran sungai, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan. Situasi tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan antara tujuan pembangunan ekonomi dengan prinsip keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kabupaten Konawe Utara dipilih sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena mampu merepresentasikan keterkaitan antara aspek demografi, kebijakan agraria, dan kualitas pemerintahan daerah di Sulawesi Tenggara. Tingginya jumlah penduduk usia produktif yang membutuhkan kesempatan kerja dan sumber penghidupan harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya agraria yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana dinamika demografi dan kebijakan agraria dalam kasus konflik pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara memengaruhi terwujudnya pemerintahan daerah yang responsif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen resmi yang berkaitan dengan demografi, agraria,

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (15-25)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/56a46306

dan pemerintahan daerah. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji keterkaitan aspek demografi dan kebijakan agraria dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Aspek Demografi Dan Kebijakan Agraria Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Responsif Di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Secara demografis, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif, yaitu sekitar 67,56% dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan adanya bonus demografi yang secara teoritis dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan partisipasi politik.

Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tenggara berada di kisaran 3,3–3,4% pada tahun 2025, yang secara statistik tergolong rendah. Akan tetapi, rendahnya angka pengangguran ini tidak serta-merta mencerminkan kualitas pekerjaan yang baik, karena sebagian besar tenaga kerja masih terserap di sektor informal dengan pendapatan yang relatif rendah.



Sumber: BPS Sultra (2025)

Selain itu, ketimpangan ekonomi juga menjadi indikator penting dalam melihat dampak demografi terhadap pemerintahan daerah. Berdasarkan data terbaru BPS Sultra (2025), Gini Ratio Sulawesi Tenggara pada Maret 2025 sebesar 0,363, yang menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih berada pada kategori sedang. Kondisi ini menandakan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah.[7]

[7] BPS Sultra. 2025. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tenggara diakses melalui https://sultra.bps.go.id/en/statistics-table/1/NDk3MCMx/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota-di-sulawesi-tenggara--2020-2024.html pada tanggal 12 April 2026 pukul 23.35 WITA

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (15-25)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/56a46306

Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi lokal. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung memiliki partisipasi politik yang lebih rendah atau bersifat pragmatis. Dalam konteks ini, bonus demografi justru dapat menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, aspek demografi di Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi potensi pembangunan, tetapi juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk produktif dan distribusi kesejahteraan dapat memengaruhi stabilitas sosial dan kualitas demokrasi di daerah.

Persoalan agraria tidak dapat dilepaskan dari ekspansi besar-besaran industri pertambangan nikel. Data terbaru menunjukkan bahwa terdapat sekitar 176 Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif di wilayah ini, namun pengawasannya dinilai lemah akibat sentralisasi perizinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola agraria di Sulawesi Tenggara cenderung lebih berpihak pada kepentingan investasi dibandingkan perlindungan hak masyarakat lokal.[8]

Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi demografi cukup besar untuk mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Utara, jumlah penduduk usia produktif (20–64 tahun) lebih besar dibandingkan kelompok usia nonproduktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Konawe Utara sedang berada pada fase bonus demografi yang dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, bonus demografi tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila didukung oleh kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menciptakan lapangan kerja yang memadai.

Secara teoritis, bonus demografi merupakan peluang pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pemerintah mampu mengoptimalkan investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sutikno (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan bonus demografi sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan publik yang mampu mengembangkan kompetensi penduduk usia produktif sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi demografi di Konawe Utara seharusnya menjadi modal utama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari sisi kebijakan agraria, Kabupaten Konawe Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama pada sektor pertambangan nikel, perkebunan, dan kehutanan. Kekayaan sumber daya tersebut memberikan peluang besar bagi peningkatan pendapatan daerah, tetapi pada saat yang sama menuntut adanya tata kelola agraria yang baik. Menurut

[8] Riset 2025 Bongkar Kegagalan Industri Nikel Sultra: Lingkungan Rusak, Hak Warga Terabaikan! ", selengkapnya dengan link: https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1139856096/riset-2025-bongkar-kegagalan-industri-nikel-sultra-lingkungan-rusak-hak-warga-terabaikan

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (15-25)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/56a46306

Thohir (2020), pelaksanaan reforma agraria di Sulawesi Tenggara bertujuan menciptakan kepastian hukum atas penguasaan tanah, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi tanah dan penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara juga menempatkan aspek demografi dan pengelolaan sumber daya sebagai bagian penting dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021–2026 menjelaskan bahwa kondisi demografi menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, sedangkan RKPD Tahun 2026 menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan pendapatan yang tercermin dari nilai Gini Ratio yang masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Keterkaitan antara aspek demografi dan kebijakan agraria menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif. Penduduk usia produktif membutuhkan kesempatan kerja, akses terhadap lahan produktif, dan pelayanan publik yang berkualitas. Di sisi lain, pengelolaan agraria yang adil akan meningkatkan kepastian hukum, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, integrasi kebijakan demografi dan agraria menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara.

Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola agraria secara responsif dan berkeadilan. Lemahnya pengawasan terhadap perusahaan, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta tidak meratanya distribusi lahan mencerminkan rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, reformasi kebijakan agraria yang berbasis keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat mendesak untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang benar-benar responsif di Sulawesi Tenggara.

3.2 *Tantangan Yang Dihadapi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Responsif Akibat Konflik Agraria Yang Ditimbulkan Oleh Ekspansi Pertambangan Nikel Di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara*

Konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif. Kabupaten ini memiliki cadangan nikel yang besar sehingga menjadi salah satu tujuan investasi pertambangan di Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, peningkatan aktivitas pertambangan memunculkan berbagai persoalan berupa sengketa lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah. Penelitian mengenai hubungan kekuasaan dalam pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa proses pengelolaan sumber daya mineral melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda sehingga sering menimbulkan dinamika dalam tata kelola pemerintahan daerah (Wicaksana et al, 2026).

Tantangan berikutnya adalah meningkatnya konflik penguasaan dan pemanfaatan lahan

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (15-25)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/56a46306

sebagai dampak ekspansi pertambangan nikel. Perselisihan mengenai batas wilayah, kepemilikan lahan, hingga perubahan fungsi lahan produktif menjadi kawasan pertambangan menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan perusahaan. Konflik agraria di wilayah pertambangan umumnya dipicu oleh perbedaan kepentingan, pelanggaran hak masyarakat, dan sengketa wilayah sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan mediasi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas yang kuat dalam memfasilitasi penyelesaian konflik secara adil dan berkelanjutan (Maga et al,2025).

Selain konflik kepemilikan lahan, aktivitas pertambangan juga menimbulkan tantangan berupa degradasi lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Penelitian dalam Analisis Kebijakan Pertanian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel menyebabkan perubahan penggunaan lahan, pencemaran sumber air irigasi, serta penurunan produktivitas pertanian masyarakat di sekitar kawasan tambang. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup (Maga et al, 2025).

Dari sisi sosial ekonomi, keberadaan industri pertambangan belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya lahan produktif dan terganggunya aktivitas usaha tani. Kondisi ini mengakibatkan munculnya kesenjangan antara kelompok yang memperoleh manfaat dari industri pertambangan dengan masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Hasriati et al, 2019).

Tantangan lainnya berkaitan dengan lemahnya koordinasi dan penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan pertambangan. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjalankan fungsi regulasi, tetapi juga berperan sebagai mediator yang mampu menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Penelitian mengenai penyelesaian konflik masyarakat akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarinstansi, penegakan regulasi pertambangan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Apabila koordinasi tersebut tidak berjalan optimal, konflik agraria berpotensi berlangsung berkepanjangan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Hasriati et al, 2019).

Selain aspek agraria, tantangan demografi juga memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif. Pertumbuhan penduduk usia produktif meningkatkan kebutuhan terhadap lapangan kerja, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi. Namun, apabila peluang kerja yang tersedia tidak mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal, maka akan muncul persoalan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Dalam konteks Kabupaten Konawe Utara, kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena sebagian besar peluang ekonomi terkonsentrasi pada sektor pertambangan sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang mampu mengembangkan sektor ekonomi lainnya secara berkelanjutan.

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (15-25)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/56a46306

3.3 *Solusi Yang Dapat Diterapkan Untuk Mengatasi Konflik Agraria Akibat Ekspansi Pertambangan Nikel Guna Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Responsif Di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara*

Salah satu solusi utama dalam mengatasi konflik agraria akibat ekspansi pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara adalah memperkuat implementasi reforma agraria secara berkelanjutan. Reforma agraria tidak hanya berorientasi pada redistribusi tanah, tetapi juga mencakup penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar tercipta keadilan sosial bagi masyarakat. Menurut Thohir (2020), pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Sulawesi Tenggara perlu dioptimalkan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional sehingga mampu mengurangi konflik pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap aspek administratif perizinan, tetapi juga terhadap kewajiban perusahaan dalam melaksanakan reklamasi, pengelolaan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Lemahnya pengawasan pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya konflik antara masyarakat dan perusahaan pertambangan. Oleh karena itu, pengawasan yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel (Putra et al, 2023).

4. Simpulan

Aspek demografi dan kebijakan agraria memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Bonus demografi yang ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif merupakan potensi besar bagi pembangunan daerah karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kualitas pelayanan publik. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja yang berkualitas, ketimpangan sosial ekonomi, serta belum meratanya distribusi manfaat pembangunan.

Di sisi lain, ekspansi pertambangan nikel sebagai sektor unggulan daerah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan agraria. Konflik penguasaan lahan, perubahan fungsi lahan, degradasi lingkungan, serta lemahnya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh peningkatan investasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, antara lain melalui penguatan pelaksanaan reforma agraria, peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, penerapan tata kelola

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (15-25)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/56a46306

pemerintahan yang transparan dan partisipatif, penyelesaian konflik melalui pendekatan kolaboratif, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan sumber daya agraria yang adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, konflik agraria akibat ekspansi pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara dapat dikelola secara lebih efektif sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pemberi hibah atau bantuan yang diberikan kepada peneliti jika dianggap perlu. Ucapan terima kasih juga dapat ditujukan kepada orang yang ikut berperan dalam penyelesaian penelitian dan penulisan artikel.

Daftar Pustaka

BPS Sultra. 2025. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tenggara diakses melalui https://sultra.bps.go.id/en/statistics-table/1/NDk3MCMx/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota-di-sulawesi-tenggara--2020-2024.html pada tanggal 12 April 2026 pukul 23.35 WITA

Harjudin, L. O., & Zuada, L. H. (2020). „Musim semi" dinasti politik pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara. *Transformative*, 6(1). https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.6

Huriyah, S., Hazyimara, K., & Zuhairah, S. (2024). Dinamika keamanan dan demokrasi di Indonesia. *Sanger: Journal of Social, Administration and Government Review*, 2(2). https://doi.org/10.22373/sanger.v2i2.5967

Larasati, E. (2016). Penyusunan pedoman kebijakan penanganan kependudukan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan umum. *Dialogue*, 2(2).

Muhiddin, A. (2015). Penduduk dan demokrasi (studi kasus pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013–2018 di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa). *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1). https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.101

Muslim, C., Nur, S., Hastuti, H., & Muadsim, I. (2024). Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 3(3). https://doi.org/10.53867/jea.v3i3.100

Saputra, R. (2025). Ketimpangan spasial produksi komoditas pangan strategis di Sulawesi Tenggara: Kajian empiris dan implikasinya terhadap ketahanan pangan wilayah. *Buletin Agrohorti*, 13(3). https://doi.org/10.29244/

Sumber Artikel berjudul " Riset 2025 Bongkar Kegagalan Industri Nikel Sultra: Lingkungan Rusak, Hak Warga Terabaikan! ", selengkapnya dengan link: https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1139856096/riset-2025-bongkar-kegagalan-industri-nikel-sultra-lingkungan-rusak-hak-warga-terabaikan?

Thohir, R. A. Y. (2020). Redistribution of reforma agraria land object (TORA) in Sulawesi Tenggara Province, Indonesia. *Science Heritage Journal*, 4(1), 31–34.

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (15-25)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/56a46306

https://doi.org/10.26480/gws.01.2020.31.34

Zuber, A. (2013). Konflik agraria di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147–158

Hasriati, & Tinaprilla, N. (2019). Analisis pendapatan usahatani padi sawah terkena dampak pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal AGRISEP,* 18(1), 53–60. https://doi.org/10.31186/jagrisep.18.1.53-60

Maga, L., Salahuddin, Malik, N., & Marei, D. (2025). Degradasi lingkungan dan dampaknya terhadap kegiatan usaha tani di sekitar lokasi pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. *Analisis Kebijakan Pertanian,* 23(1), 113–133. https://doi.org/10.21082/akp.v23n1.2025.113-133

Wicaksana, M. A., & Putri, N. I. P. (2026). The impact of nickel downstreaming policy on the transformation of the economic structure of Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis,* 4(1), 11–19. https://doi.org/10.70716/emis.v4i1.463